

PROBLEMATIKA GURU SDN KURIPAN 2 BANJARMASIN DALAM KESIAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Muhammad Yuda Anshari^{1*}, Dewi Ratih Rapisa², Hasanudin²

¹SDN Kuripan 2 Banjarmasin

²Program Studi Pendidikan Khusus FKIP Universitas Lambung Mangkurat

*Corresponding Author: Yudaansharimuhammad@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini berlatar belakang adanya permasalahan dalam kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal ini ditunjukkan oleh kepala sekolah dan guru yang masih belum memahami pendidikan inklusif, serta layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Tujuan penelitian adalah mengetahui problematika, dukungan dan upaya guru SDN SN Kuripan 2 Banjarmasin dalam kesiapan menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian adalah guru SDN SN Kuripan 2 Banjarmasin. Teknik dalam pengumpulan data melalui angket, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik untuk menganalisis data yaitu mendeskripsikan secara keseluruhan yang diperoleh selama penelitian, melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan problematika SDN SN Kuripan 2 Banjarmasin dalam kesiapan penyelenggaraan pendidikan inklusif: 1) sikap guru pada tingkatan yang baik dalam memahami pendidikan inklusif; 2) dukungan yang dilakukan guru berupa meningkatkan kemampuan diri; 3) kendala yang dihadapi, antara lain: pemenuhan aksesibilitas, kurangnya kemampuan berkomunikasi dengan isyarat, kesulitan membagi perhatian dengan ABK saat di kelas, serta kesulitan memahami karakter ABK dikarenakan guru tidak berlatarbelakang pendidikan khusus; 4) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala, dengan terus berupaya membekali diri dan belajar melalui kegiatan workshop/seminar tentang pendidikan inklusif.

Kata Kunci: Problematika, Kesiapan, Pendidikan, Inklusif.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk membantu perkembangan individu agar lebih optimal baik dalam perkembangan akademik maupun emosi sosialnya sehingga dapat hidup dalam lingkungan sekitarnya. Menurut Yunus dan Langeveld (dalam Utami, 2017), mengatakan pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi.

Berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Layanan pendidikan yang bermutu bagi ipeserta didik berkebutuhan khusus adalah layanan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan yang dimilikinya. Pendidikan yang memuat tentang kemanusiaan dan penegakan hak-hak asasi manusia merupakan sarat paradigma pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sebuah falsafah pendidikan yang dapat mengakomodasi semua peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. PERMENDIKNAS Nomor 70 Tahun 2009 mewajibkan agar pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan.

Menurut Ratnawulan (2017) sekolah harus siap dalam melaksanakan pendidikan inklusif karena pendidikan inklusif adalah sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berupaya menjangkau semua anak tanpa terkecuali. Menurut Hartadi, dkk (2019) setiap sekolah wajib menerapkan pendidikan inklusif karena sejak keluarnya PERMENDIKBUD Nomor 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi yang mengharuskan menerima semua peserta didik yang berada di sekitar sekolah tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus. Menurut Puspitasari (2019) seorang

guru di sekolah harus siap dalam penerapan pendidikan inklusif dan memberikan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus, karena seorang guru harus bisa mengatasi berbagai faktor dalam menyiapkan pendidikan inklusif.

Sesuai dengan peraturan pemerintah, manajemen dan kesiapan penyelenggaraan pendidikan suatu sekolah akan efektif dan efisien apabila sekolah siap menjalankan layanan pendidikan inklusif tersebut. Fenomena yang terdapat di suatu sekolah adalah ketidaksiapan sekolah menjadi sekolah inklusif, padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang bestandar nasional. Kesiapan yang terlihat adalah kepala sekolah dan beberapa guru tidak mau menerima dengan inklusif yang harus menerima dan memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Berangkat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Problematika SDN SN Kuripan 2 Banjarmasin dalam Kesiapan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif".

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi deskriptif yang dijabarkan untuk mengkaji tentang sekolah yang berstandar nasional yang belum menerapkan inklusif. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti berusaha untuk meneliti lebih dalam dan menganalisis tentang masalah yang terjadi Subjek dalam penelitian ini ada 6 orang, terdiri dari 3 guru kelas, 1 guru mata pelajaran olahraga, 1 guru mata pelajaran agama, dan kepala sekolah. Sumber data primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Adapun data sekunder berupa data sekunder berasal dari, beberapa dokumen data dan dokumentasi foto proses observasi dan dokumen angket. Langkah-langkah analisis data meliputi 3 tahap yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. PERMENDIKNAS Nomor 70 Tahun 2009 mewajibkan agar pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan. Maka dari itu, sekolah wajib menerapkan pendidikan inklusif yang mendasari bahwa anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan layanan khusus lainnya.

3.1 Sikap guru.

Hasil penelitian tentang sikap guru SDN SN Kuripan 2 Banjarmasin memiliki tingkat yang baik dalam memahami pendidikan inklusif dan tujuan pendidikan inklusif, walaupun guru-guru tidak pernah terlibat dalam pendidikan inklusif itu secara langsung. Menurut Ratnawulan (2017), sekolah harus siap dalam melaksanakan pendidikan inklusif karena pendidikan inklusif adalah sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berupaya menjangkau semua anak tanpa terkecuali. Guru-guru sepakat siapa saja yang terlibat dipendidikan inklusif mulai dari orangtua, keluarga, guru hingga lembaga-lembaga terkait. Menurut Schultz (dalam Asriningtyas 2015), sepuluh kategori utama kesiapan yang merupakan prasyarat bagi sekolah yang lebih ramah dan inklusi. Lebih lanjut menurutnya lingkungan pembelajaran inklusif dapat dicapai jika memperhatikan kategori-kategori tersebut. Kategori tersebut antara lain, sikap, persahabatan, dukungan bagi siswa, dukungan untuk guru, kepemimpinan administratif, kurikulum, penilaian, program dan evaluasi staf, keterlibatan orang tua, dan keterlibatan masyarakat. Guru-guru juga

akan memberikan bimbingan khusus seperti pelajaran tambahan, motivasi, dan perhatian lebih serta tidak membedakan antara anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya.

3.2 Dukungan Guru.

Hasil penelitian tentang dukungan adalah guru-guru sepakat untuk mengikuti seminar/workshop dan belajar lagi tentang pendidikan inklusif. Menurut Puspitasari (2019), seorang guru di sekolah harus siap dalam penerapan pendidikan inklusif dan memberikan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus, karena seorang guru harus bisa mengatasi berbagai faktor dalam menyiapkan pendidikan inklusif. Pemenuhan akses untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah belum ada, dikarenakan belum menjadi sekolah inklusif. Menurut Kustawan (2013), penerapan pendidikan inklusif ditujukan untuk pengembangan kebijakan, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, kapasitas bangunan atau lokal, dan keterlibatan masyarakat serta kerjasama pihak-pihak terkait.

3.3 Kendala Guru.

Hasil penelitian terdapat kendalanya dalam memahami bahasa terutama bahasa isyarat, sulit memahami karakter anak, sulit membagi perhatian antara anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya. Selain itu, guru-gurunya juga tidak belatar belakang pendidikan khusus serta kurangnya dana untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Menurut Tartono (2016) beberapa permasalahan guru dalam penerapan pendidikan inklusif adalah kurangnya guru pendamping khusus (GPK) disekolah inklusif, kurangnya kompetensi guru dalam menangani ABK, guru kesulitan dalam Kegiatan Belajar Mengajar dan latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai.

3.4 Upaya Guru.

Hasil penelitian menjelaskan guru akan berupaya menyiapkan diri dan mencari tahu serta belajar lagi tentang pendidikan inklusif. SDN SN Kuripan 2 Banjarmasin juga siap menerima anak berkebutuhan khusus kalau ada yang mendaftar di sekolah tersebut. Menurut Hartadi, dkk. (2019), setiap sekolah wajib menerapkan pendidikan inklusif karena sejak keluarnya PERMENDIKBUD Nomor 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi yang mengharuskan menerima semua peserta didik yang berada disekitar sekolah tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus. Menurut Saputra (2016), penerapan sistem pendidikan inklusif ditujukan untuk pengembangan kebijakan, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, kapasitas bangunan atau lokal, dan keterlibatan masyarakat serta kerjasama pihak-pihak terkait.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan terkait problematika guru SDN SN Kuripan 2 Banjarmasin dalam kesiapan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sudah terlaksana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 4.1** Sikap guru masih memiliki tingkat yang baik dalam memahami apa itu pendidikan inklusif dan tujuan pendidikan inklusif walaupun guru-guru tidak pernah terlibat dalam pendidikan inklusif itu secara langsung, serta akan berkoordinasi dengan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus dalam menangani anak tersebut.
- 4.2** Dukungan guru meliputi peningkatan mutu pendidikan guru-guru semuanya sepakat untuk mengikuti iseminar/workshop dan belajar lagi tentang pendidikan inklusif.
- 4.3** Kendala guru antara lain, pemenuhan aksesibilitas, kurang memahami bahasa terutama bahasa isyarat, sulit memahami karakter anak, sulit membagi perhatian antara anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya. Selain itu, guru-gurunya juga tidak belatar belakang pendidikan khusus serta kurangnya dana untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- 4.4** Upaya guru untuk mengatasi kendala, dengan terus berupaya membekali diri dan belajar

melalui kegiatan iworkshop/seminar tentang pendidikan inklusif, serta juga siap menerima anak berkebutuhan khusus kalau ada yang mendaftar di sekolah tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

Asriningtyas. (2015). Sikap Guru Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Inklusif Se-Kabupaten Purbalingga. *Skripsi*.

Hartadi, dkk. (2019). Kesiapan Sekolah dalam Melaksanakan Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *Jurnal Vol 5:2*.

Kustawan. (2013). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Luxima Metro Media.

Puspitasari, Reni. (2019). Kesiapan Guru Teacher Readiness dalam Menangani Siswa Berkebutuhan Khusus di Kelas Reguler Pada Sekolah Berbasis Inklusif. *Skripsi*.

Ratnawulan. (2017). Kesiapan Sekolah Inklusif Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Vol 3:1*.

Saputra. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. 1-12.

Tarnoto, N. (n.d.). Permasalahan-permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD. *Humanitas*, 51-55.

Utami, F. N. (2017). Tingkat Kesiapan Sekolah Dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV B SD Negeri 1 Tlirenggo Bantul Yogyakarta. *Skripsi*, 12-28.

